

MODUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PENANDAAN TITIK TEMU EVAKUASI SEBAGAI
UPAYA MITIGASI RISIKO BENCANA DI LINGKUNGAN
MASYARAKAT**



Oleh:

Dr. GIDEON SETYO BUDIWITJAKSONO, M.Si

NIDN. 0722066701

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ANNABELLE XAVIERA UTAMI | 22071010112 |
| RANGGA ARDANA GEGANA SURYADI | 22025010143 |
| SAFIRA RAMADHANI | 22011010102 |
| AMELIA KAMLANNABILA | 22011010025 |
| DWI ROSDIANA PUTRI | 22071010178 |

KELOMPOK 138 KKNT MBKM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Modul : Penandaan Titik Temu Evakuasi Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Bencana Di Lingkungan Masyarakat
2. Nama Dosen Pembimbing Lapangan
 - a. Nama Lengkap : Dr. Gideon Setyo Budiwitjaksono, M.Si
 - b. NIDN : 0722066701
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Akuntansi.
 - e. Nomor HP : 087780479158
 - f. Alamat e-mail : gideon.ak@upnjatim.ac.id
 - g. Perguruan Tinggi : UPN "Veteran" Jawa Timur
3. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Klampis Ngasem
4. Anggota :
 1. Nama Lengkap : Annabelle Xaviera Utami
NPM : 22071010112
Prodi : Hukum
 2. Nama Lengkap : Rangga Ardana Gegana Suryadi
NPM : 22025010143
Prodi : Agroteknologi
 3. Nama Lengkap : Safira Ramadhani
NPM : 22011010102
Prodi : Ekonomi Pembangunan
 4. Nama Lengkap : Amelia Kamlannabila
NPM : 22011010102
Prodi : Ekonomi Pembangunan
 5. Nama Lengkap : Dwi Rosdiana Putri
NPM : 22071010178
Prodi : Hukum

4. Nama Lengkap : Amelia Kamlannabila
NPM : 22011010102
Prodi : Ekonomi Pembangunan
5. Nama Lengkap : Dwi Rosdiana Putri
NPM : 22071010178
Prodi : Hukum

Surabaya, 25 Juli 2025

Menyetujui,
DPL Kelompok 138



Dr. Gideon Setyo Budiwitjaksono, M.Si
NIP. 196706222021211001

Ketua Kelompok



Clarasita Bantu
NPM. 22071010055

Mengetahui,
Kepala LPPM



Prof. Dr. If. Rosyda Privadarshini, M.P.
NIP. 19670310 199103 2001

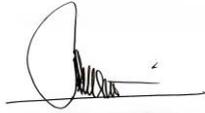
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, modul *“Penandaan Titik Temu Evakuasi sebagai Upaya Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan Masyarakat”* ini dapat tersusun dengan baik. Modul ini merupakan hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang dilaksanakan di RW 09 Kelurahan Klampis Ngasem. Penyusunan modul ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jalur dan titik temu evakuasi yang jelas sebagai langkah awal mitigasi bencana. Padahal, dalam situasi darurat, keberadaan titik temu evakuasi sangat penting untuk meminimalisir kepanikan, mempercepat proses evakuasi, serta memastikan koordinasi warga berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, program ini dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi bersama warga, hingga pemasangan papan penanda titik temu evakuasi di lokasi strategis yang mudah dijangkau. Selain itu, kelompok KKN juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fungsi titik temu evakuasi serta pentingnya keterlibatan aktif warga dalam menjaga keberlanjutan fasilitas tersebut. Melalui pendekatan partisipatif, diharapkan warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang siaga bencana.

Kami menyadari modul ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami modul ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat maupun pihak lain yang membutuhkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama masyarakat RW 09 Kelurahan Klampis Ngasem yang dengan antusias terlibat dalam setiap tahapan. Semoga modul ini dapat menjadi langkah kecil menuju terciptanya lingkungan yang lebih aman, tanggap, dan tangguh menghadapi bencana.

Surabaya, 25 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

Dr. Gideon Setyo Budiwitjaksono, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Modul | 2 |
| 2. HAL DAN PEMBAHASAN | 4 |
| 2.1 Definisi Pajak | 4 |
| 2.2 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan | 5 |
| 2.3 Dasar Hukum PBB | 6 |
| 2.4 Wajib Pajak | 7 |
| 2.5 Objek Pajak | 8 |
| 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak | 9 |
| 2.7 Verifikasi dan Validasi Data Lapangan | 11 |
| 2.8 Proses Verifikasi dan Validasi (Verval) Data di Lapangan | 12 |
| 2.9 Petunjuk Pengisian Kertas Berita Acara Penelitian Lapangan | 15 |
| 2.10 Tata Cara Input Penagihan Pajak | 18 |
| 2.11 Penyampaian Himbauan pembayaran PBB | 24 |
| 2.12 Prosedur Penyampaian Himbauan Tagihan PBB secara <i>door to door</i> | 26 |
| 2.13 Efektifitas Penyampaian Tagihan Pajak | 28 |
| 3. KESIMPULAN DAN SARAN | 31 |
| 3.1 Kesimpulan | 31 |
| 3.2 Saran | 32 |
| DAFTAR PUSTAKA | 33 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Berita Acara Penelitian Lapangan | 16 |
| Gambar 2. Tampilan Login Website Penagihan Pajak | 18 |
| Gambar 3. Tampilan Laman Login Website | 19 |
| Gambar 4. Tampilan Untuk Laman Input NOP (Nomor Objek Pajak) | 19 |
| Gambar 5. Akses Form Input Penagihan PBB | 20 |
| Gambar 6. Tampilan Input Pilihan Status Penagihan | 20 |
| Gambar 7. Rincian Status Penagihan | 21 |
| Gambar 8. Rincian Untuk Pilihan Status Penagihan “Kembali” | 21 |
| Gambar 9. Tampilan Input Tanggal Tagihan | 22 |
| Gambar 10. Upload Foto Objek Pajak | 22 |
| Gambar 11. Upload Foto Berita Acara Penelitian | 23 |
| Gambar 12. Tampilan Penambahan Keterangan | 23 |
| Gambar 13. Mengupload Hasil Penagihan Pajak | 24 |

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi karena berada di wilayah Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) yang rawan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan berbagai bencana alam lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 3.000 kejadian bencana di Indonesia, yang sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Tingginya angka kejadian bencana tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak kerugian, baik secara material maupun korban jiwa.

Kelurahan Klampis Ngasem, yang berada di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, termasuk salah satu wilayah dengan potensi risiko bencana, khususnya banjir akibat curah hujan tinggi, sistem drainase yang kurang optimal, serta kepadatan permukiman di beberapa RW. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh kelompok KKN Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ditemukan bahwa RW 09 merupakan salah satu area yang cukup padat penduduk dan memiliki jalur evakuasi yang belum terorganisasi dengan baik. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami pentingnya adanya titik temu evakuasi yang jelas sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Hal ini dapat berakibat fatal jika sewaktu-waktu terjadi bencana yang membutuhkan evakuasi cepat dan terkoordinasi.

Mitigasi risiko bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan

oleh bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu aspek penting dalam mitigasi adalah penentuan dan penandaan titik temu evakuasi. Titik temu evakuasi adalah lokasi yang telah ditentukan sebagai tempat berkumpul sementara bagi masyarakat ketika terjadi bencana, sebelum diarahkan ke tempat evakuasi yang lebih aman (Sari and Ruhyat 2024). Penandaan yang jelas dan dapat diakses dengan mudah akan mempermudah proses evakuasi serta menghindari kepanikan dan kebingungan masyarakat saat keadaan darurat.

Di RW 09 Kelurahan Klampis Ngasem, kesadaran masyarakat mengenai jalur evakuasi dan titik temu masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari belum adanya papan penanda khusus maupun rambu yang memberikan informasi mengenai lokasi titik kumpul. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena keberadaan titik temu evakuasi yang jelas dapat meminimalkan risiko korban jiwa ketika bencana terjadi (Nuryuningsih 2021). Apalagi dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, proses evakuasi yang tidak terorganisir berpotensi menyebabkan kemacetan, kepanikan massal, serta kesulitan bagi petugas dalam memberikan bantuan.

Selain faktor fisik, permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya literasi masyarakat mengenai mitigasi bencana. Sebagian besar warga masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut tanpa adanya pedoman atau panduan tertulis yang baku mengenai apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Padahal, peran masyarakat sangat vital dalam penanggulangan bencana, karena masyarakat adalah pihak yang pertama kali merasakan dampak bencana dan sekaligus menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan diri (Alim 2019).

Melihat kondisi tersebut, kelompok KKN Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur berinisiatif untuk melaksanakan program Penandaan Titik Temu Evakuasi sebagai Upaya Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan Masyarakat, yang difokuskan di RW 09 Kelurahan Klampis Ngasem. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya titik temu evakuasi serta memasang penanda di lokasi strategis yang mudah dilihat oleh warga. Melalui program ini, diharapkan tercipta kesadaran kolektif masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana, sekaligus meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi risiko bencana.

Penandaan titik temu evakuasi tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk arah, tetapi juga menjadi simbol kesiap-siagaan komunitas terhadap ancaman bencana. Dengan adanya penanda yang jelas, proses evakuasi dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan konsep Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM), yaitu pendekatan penanggulangan bencana yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengurangan risiko bencana (Andrew 2018). Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek yang berdaya dan memiliki kapasitas untuk melindungi diri sendiri serta lingkungannya.

Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam program ini mencerminkan peran mahasiswa sebagai *agent of change* yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat (Napsiyah et al. 2023). Dengan bekal pengetahuan yang dimiliki, mahasiswa dapat membantu memberikan edukasi yang lebih efektif dan mudah dipahami, sekaligus menjadi fasilitator dalam mewujudkan sistem mitigasi

bencana berbasis komunitas. Kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah kelurahan diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang tanggap bencana dan siap menghadapi situasi darurat.

Melalui kegiatan penandaan titik temu evakuasi ini, manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi risiko bencana dan persiapan menghadapi situasi darurat.
2. Mempermudah proses evakuasi dengan adanya penanda yang jelas, sehingga masyarakat dapat berkumpul di titik yang telah ditentukan sebelum dievakuasi lebih lanjut.
3. Membangun budaya kesiapsiagaan bencana, sehingga masyarakat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam meminimalkan dampak bencana.
4. Meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah kelurahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi potensi bencana.

Dengan demikian, pelaksanaan program “Penandaan Titik Temu Evakuasi sebagai Upaya Mitigasi Risiko Bencana di Lingkungan Masyarakat” di RW 09 Kelurahan Klampis Ngasem merupakan langkah strategis yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemasangan penanda, tetapi juga berdampak jangka panjang berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata sinergi antara mahasiswa dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah terkait pengurangan risiko bencana serta menciptakan lingkungan yang tanggap, siaga, dan tangguh bencana.

1.2 Tujuan Modul

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat RW 09 Kelurahan Klampis Ngasem tentang pentingnya mitigasi risiko bencana dan titik temu evakuasi.
2. Menyediakan penanda titik temu evakuasi yang jelas, strategis, dan mudah diakses oleh seluruh warga.
3. Mempermudah proses evakuasi saat terjadi bencana dengan adanya sistem tanda dan lokasi berkumpul yang telah disepakati.
4. Melibatkan mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah kelurahan dalam membangun kesiapsiagaan bersama berbasis komunitas.
5. Mendorong terbentuknya budaya tanggap bencana, sehingga masyarakat lebih siap dan terorganisir saat menghadapi situasi darurat.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Mitigasi Bencana

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik yang bersifat alamiah seperti gempa bumi dan banjir, maupun non-alamiah seperti kebakaran atau wabah penyakit. Dampaknya sering kali menimbulkan kerugian besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat bencana. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mitigasi bencana.

Mitigasi bencana merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Upaya ini dapat berupa pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman. Secara umum, istilah mitigasi bencana merujuk pada segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak dari suatu bencana, yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Tindakan ini mencakup kesiapsiagaan dan pengurangan risiko dalam jangka panjang (Kurniawati, 2020). Menurut Pasal 1 ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 angka 9, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan fisik serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana

Mitigasi dilakukan sebagai langkah pengurangan risiko bencana terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan

bencana (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat (1)). Lebih lanjut, mitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik bencana alam, bencana non-alam (akibat ulah manusia), maupun gabungan keduanya (PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1)). Secara umum, bencana dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bencana alam, yakni rangkaian peristiwa yang dipicu oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam, yaitu bencana yang dipicu oleh faktor non-alam seperti kegagalan teknologi, epidemi atau wabah penyakit, dan pencemaran lingkungan. Contoh bencana non-alam antara lain pandemi COVID-19, kecelakaan industri, atau insiden nuklir.
3. Bencana sosial, yaitu bencana yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti konflik sosial, tindakan kriminal, penyakit masyarakat, dan terorisme.

Mitigasi bencana merupakan komponen penting dalam sistem manajemen bencana dan harus menjadi titik tolak utama dalam upaya penanggulangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu (Anggarasari & Dewi, 2019):

- a) Ketersediaan informasi dan peta wilayah rawan bencana untuk setiap jenis bencana;
- b) Pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan;

- c) Pengetahuan tentang tindakan yang harus dilakukan dan dihindari, serta cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi; dan
- d) Pengaturan dan penataan ruang di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi ancaman.

2.2 Jenis-Jenis Bencana di Lingkungan Permukiman

Lingkungan permukiman memiliki kerentanan tersendiri terhadap berbagai jenis bencana. Bencana yang umum terjadi di kawasan permukiman meliputi:

1) Bencana Alam

- Banjir

Terjadi akibat curah hujan tinggi, drainase buruk, atau meluapnya sungai. Kawasan permukiman yang berada di dataran rendah dan dekat sungai sangat rentan terhadap banjir.

- Gempa Bumi

Dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk rumah dan fasilitas umum. Permukiman yang berada di jalur patahan lempeng tektonik memiliki risiko lebih besar.

- Tsunami

Mengancam daerah permukiman yang berada di wilayah pesisir. Risiko meningkat jika tidak ada sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang jelas.

- Tanah Longsor

Umum terjadi di kawasan perbukitan atau dataran tinggi yang kurang stabil, terutama saat musim hujan.

- Kekeringan dan Gelombang Panas

Dapat menyebabkan krisis air bersih, gagal panen, dan ancaman kesehatan, khususnya di permukiman dengan akses air terbatas.

2) Bencana Non-Alam

- Kebakaran Permukiman

Dapat terjadi karena korsleting listrik, kelalaian manusia, atau sistem kelistrikan dan bahan bangunan yang tidak aman.

- Pandemi atau Wabah Penyakit

Misalnya, pandemi COVID-19 yang menunjukkan betapa pentingnya mitigasi dalam bentuk edukasi kesehatan, penyediaan fasilitas cuci tangan, dan penataan ruang untuk mencegah kerumunan.

3) Bencana Sosial

- Kerusakan Sosial atau Konflik Warga

Bisa muncul akibat ketimpangan sosial, persaingan sumber daya, atau gesekan antar kelompok. Meskipun tidak selalu terjadi, namun tetap merupakan ancaman bagi stabilitas di lingkungan permukiman.

Dengan mengenali jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di lingkungan permukiman, masyarakat dapat lebih siap melakukan tindakan preventif. Salah satu bentuk kesiapsiagaan yang efektif adalah adanya titik temu evakuasi yang jelas dan mudah diakses oleh seluruh warga sebagai bagian dari mitigasi bencana yang terencana.

2.3 Pentingnya Edukasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Dalam konteks mitigasi risiko bencana di lingkungan masyarakat seperti Kelurahan Klampis Ngasem RW 09, edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Meski infrastruktur jalur evakuasi dan titik temu menjadi fokus utama, tanpa pemahaman dan kesiapsiagaan dari warga, sarana tersebut tidak akan berjalan efektif.

Kerangka global seperti Sendai Framework 2015–2030 menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan nasional, melainkan juga pada pemberdayaan komunitas secara lokal melalui edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Di Indonesia, BNPB menekankan pentingnya sosialisasi, literasi bencana, dan simulasi

evakuasi sebagai elemen utama dalam strategi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat (Kelman 2015).

1. Membangun Kesadaran dan Pengetahuan

Edukasi bencana bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan juga pengenalan terhadap risiko spesifik di wilayah setempat—misalnya potensi banjir di RW 09 atau jalur evakuasi yang tersedia. Pengetahuan ini meningkatkan kesadaran warga terhadap bahaya potensial sehingga mereka selalu waspada dan bersiap melakukan langkah mitigasi.

2. Mengembangkan Perilaku Tanggap Bencana

Ketika masyarakat terlatih melalui simulasi evakuasi, sosialisasi, atau pelatihan partisipatif, mereka menjadi mampu mengambil tindakan cepat dan tepat dalam situasi darurat. Sebuah studi menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi memiliki respons yang lebih efisien dan mampu menekan risiko korban jiwa maupun material

3. Memperkuat Kohesi Komunitas dan Modal Sosial

Masalah kebencanaan lebih efektif ditangani bila komunitas memiliki jaringan sosial yang kuat. Proses edukasi yang melibatkan warga secara langsung meningkatkan solidaritas dan keterlibatan kolektif dalam mitigasi risiko serta evakuasi bersama

4. Mendukung Efektivitas Penandaan Titik Temu Evakuasi

Penandaan titik temu evakuasi hanya berguna jika warga memahami cara penggunaannya. Melalui edukasi, warga belajar

bagaimana mencapai titik tersebut, kapan waktu yang tepat untuk berkumpul, dan apa langkah selanjutnya dari titik temu. Tanpa edukasi, penanda hanya menjadi simbol tanpa makna operasional di saat darurat.

5. Mencegah Kebingungan dan Panik Saat Bencana

Dalam bencana, kepanikan sangat mungkin terjadi, terutama jika warga tidak tahu harus bergerak ke mana. Edukasi akan mengajarkan warga memahami tanda-tanda bahaya dan rute evakuasi, sehingga mengurangi potensi konflik dan kepanikan ketika situasi darurat tiba.

Dengan pendekatan edukasi dan pelibatan aktif komunitas di Kelurahan Klampis Ngasem RW 09—terutama dalam bentuk penyuluhan tentang jalur evakuasi, eksperimen penandaan titik temu, dan latihan bersama—modul ini diharapkan dapat membekali masyarakat dengan kesiapan mental dan teknis dalam menghadapi bencana. Sehingga ketika titik temu sudah ditandai, warga tidak hanya mengenali simbol secara visual, tapi juga tahu tindakan konkret yang harus mereka lakukan saat kondisi darurat.

2.4 Titik Temu Evakuasi: Definisi dan Fungsi

Dalam konteks manajemen bencana, titik temu evakuasi memiliki peranan yang sangat vital sebagai bagian dari sistem keselamatan masyarakat. Titik temu evakuasi didefinisikan sebagai lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tempat berkumpul sementara bagi warga masyarakat yang telah dievakuasi dari daerah berbahaya atau terdampak bencana. Titik ini disiapkan guna memastikan proses evakuasi berlangsung dengan tertib, aman, dan terkoordinasi, serta

mendukung langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan bencana. Titik temu ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga menjadi bagian penting dalam rantai sistem tanggap darurat, mulai dari pendataan korban hingga penyaluran bantuan awal. Oleh karena itu, keberadaan titik temu evakuasi harus diperhatikan secara serius dalam setiap rencana kontinjensi atau mitigasi risiko bencana, baik di tingkat lingkungan, kelurahan, hingga kota/kabupaten.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya mitigasi tersebut, titik temu evakuasi telah dipasang di Kelurahan 9 Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, oleh mahasiswa KKN sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap penguatan kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Pemasangan titik temu ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga mengenai tindakan cepat saat terjadi bencana. Titik temu evakuasi idealnya ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti :

1. Keamanan lokasi dari potensi bahaya lanjutan (misalnya reruntuhan, banjir susulan, atau kebakaran)
2. Aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas
3. Jarak yang terjangkau dari permukiman penduduk, serta
4. Ketersediaan sarana pendukung seperti pencahayaan, air bersih, dan komunikasi.

Agar mudah dikenali, titik temu evakuasi biasanya ditandai dengan simbol-simbol khusus atau papan informasi yang bersifat permanen, tahan cuaca, serta

diletakkan di lokasi yang strategis dan mudah terlihat. Hal ini penting agar dalam situasi darurat, warga tidak kebingungan dalam mencari lokasi aman untuk berkumpul. Di Kelurahan Klampis Ngasem sendiri, papan tanda titik temu telah dipasang di lokasi yang strategis agar dapat diakses oleh seluruh warga. Titik temu evakuasi tidak hanya berperan sebagai tempat berkumpul semata, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya dalam kerangka manajemen bencana, yaitu:

1. Sebagai Titik Kumpul Sementara
Titik temu evakuasi menjadi tempat berkumpul sementara bagi warga terdampak bencana, yang membantu mencegah mereka tersebar dan tercecer. Dengan berkumpul di satu lokasi, proses evakuasi menjadi lebih terorganisir, dan memudahkan koordinasi lanjutan oleh petugas.
2. Sebagai Pusat Informasi dan Koordinasi
Di titik ini, petugas tanggap darurat dapat menyampaikan informasi kepada warga terkait tindakan selanjutnya, seperti arah evakuasi lanjutan, lokasi pengungsian, atau peringatan dini lainnya. Titik temu menjadi tempat pengambilan keputusan cepat di lapangan.
3. Sebagai Tempat Identifikasi Korban
Melalui titik temu, tim evakuasi dapat mencatat identitas warga yang selamat, terluka, atau hilang. Data ini penting untuk mendukung proses pencarian korban serta menjadi rujukan bagi keluarga korban yang mencari informasi tentang kerabatnya.
4. Sebagai Lokasi Distribusi Bantuan Awal
Jika logistik darurat telah tersedia, titik temu dapat

difungsikan sebagai lokasi awal untuk mendistribusikan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada warga yang terdampak. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan warga di tahap awal pascabencana.

5. Sebagai Bagian dari Sistem Manajemen Bencana Titik temu evakuasi merupakan elemen penting dalam sistem mitigasi bencana yang terencana dan terstruktur. Penentuan lokasi titik temu menjadi bagian dari simulasi dan pelatihan evakuasi yang rutin dilakukan oleh aparat dan masyarakat.

Pemahaman yang baik mengenai keberadaan, fungsi, dan tata cara penggunaan titik temu evakuasi merupakan bekal penting bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Sosialisasi dan edukasi secara berkala sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui lokasi titik temu yang terdekat, serta memahami prosedur evakuasi yang benar. Pemasangan titik temu evakuasi di Kelurahan Klampis Ngasem merupakan langkah awal yang positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang tanggap dan siaga bencana. Dengan demikian, risiko korban jiwa dan kekacauan saat bencana terjadi dapat ditekan seminimal mungkin.

2.5 Standar dan Kriteria Titik Temu Evakuasi

Titik evakuasi harus memenuhi standar dan kriteria tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan jiwa terutama saat ada bencana tertentu. Standar dan kriteria titik temu evakuasi di antara lain adalah;

1. Bebas hambatan: Jalur evakuasi tidak boleh terhalang barang, perabot, atau apapun yang menghambat pergerakan orang. Jalur evakuasi umumnya dibagi menjadi 3 (tiga jalur) yang di antara lain adalah;
 - a. Jalur menuju pintu keluar yang mudah dikenali dan diakses;
 - b. Jalur keluar menuju tempat aman di luar lokasi;
2. Penandaan jelas: Jalur diberi tanda arah evakuasi, dapat berupa papan petunjuk, stiker di lantai, dan lampu tanda darurat.
3. Lebar jalur harus diperhitungkan dan disesuaikan dengan jumlah penghuni;
4. Permukaan jalur harus licin dan bebas hambatan;
5. Untuk pintu darurat harus memiliki lebar minimal 80 cm dengan tinggi minimal 180 cm untuk mempermudah keluar masuk akses jalur evakuasi;
6. Minimal ada dua jalur evakuasi yang terpisah untuk menghindari resiko penghuni tertahan apabila satu jalur evakuasi bermasalah;
7. Harus terlindung (tertutup) dan tahan api serta asap, dengan pegangan tangan (handrail) kuat untuk keamanan tambahan.

8. Penerangan tidak boleh hanya bergantung pada listrik taa dan harus ada lampu darurat yang bisa menyala dalam keadaa darurat;

Adapun standard yang harus dipenuhi yang di antara lain adalah;

1. Lokasi dan Jarak
 - a. Titik kumpul harus berada di area terbuka, datar, luas, dan cukup besar untuk menampung semua penghuni yang dievakuasi.
 - b. Jarak minimal dari bangunan sekitar 20 meter atau lebih agar terhindar dari risiko kebakaran lanjutan, runtuh, atau bahaya lain.
 - c. Tidak boleh berada di bawah pohon besar, tiang listrik, kabel, atau objek berisiko jatuh.

2. Penandaan dan Akses

- a. Titik kumpul dilengkapi papan tanda yang jelas, mudah terlihat, dan terdapat simbol evakuasi agar mudah dikenali oleh semua orang.
- b. Akses dari jalur evakuasi ke titik kumpul harus terbuka, bebas hambatan, dan mudah dicapai semua orang, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

3. Fasilitas Pendukung

- a. Idealnya titik kumpul memiliki akses komunikasi, seperti nomor telepon darurat dan tempat perlindungan sementara.
- b. Bisa juga dilengkapi dengan perlengkapan pertolongan pertama jika memungkinkan.

2.6 Proses Penentuan Lokasi Titik Temu Evakuasi

Penentuan lokasi titik temu evakuasi harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan keselamatan evakuasi. Proses ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena titik temu berfungsi sebagai tempat strategis bagi warga untuk berkumpul sementara sebelum menuju tempat evakuasi yang lebih aman. Berikut langkah-langkah dalam proses penentuan lokasi titik temu evakuasi:

1. Identifikasi Wilayah Rawan Bencana
Langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap wilayah yang rawan bencana, seperti daerah yang sering mengalami banjir, longsor, atau gempa. Data ini dapat diperoleh informasi warga, perangkat Kelurahan, dan observasi langsung di lapangan.
2. Analisis Jalur Evakuasi
Menentukan jalur evakuasi terdekat dan teraman dari setiap titik hunian warga menuju tempat yang relatif aman. Jalur evakuasi harus bebas hambatan, cukup lebar untuk dilalui banyak orang, dan memiliki pencahayaan yang memadai.
3. Pemilihan Lokasi Strategis
Lokasi titik temu dipilih berdasarkan aksesibilitas, keamanan, dan kapasitas menampung warga. Sebaiknya

berada di ruang terbuka atau tempat umum yang mudah dikenali dan tidak terpapar risiko lanjutan dari bencana.

4. **Konsultasi dan Musyawarah Warga**
Penetapan titik temu harus dilakukan melalui diskusi bersama dengan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan warga setempat. Partisipasi warga penting untuk memastikan lokasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
5. **Penetapan dan Dokumentasi**
Lokasi yang telah disepakati akan dijadikan tempat titik kumpul evakuasi dengan diberikan tanda berupa plakat pada tempat titik kumpul evakuasi



Gambar 1. Pemasangan Plakat Titik Kumpul Evakuasi

2.7 Langkah-langkah Penandaan Titik Temu Evakuasi

Setelah lokasi titik temu evakuasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penandaan secara fisik agar mudah dikenali oleh masyarakat. Penandaan ini juga menjadi sarana edukatif untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Berikut langkah-langkah penandaan yang dapat dilakukan:

1. Desain Papan Penanda

Papan tanda harus dirancang dengan ukuran yang cukup besar, warna mencolok, dan simbol yang mudah dikenali oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dan lansia. Simbol titik temu biasanya berupa ikon orang berkumpul dengan latar warna hijau dan putih.



Gambar 2. Plakat Titik Kumpul Evakuasi

2. Penentuan Titik Arah Jalur Evakuasi

Lokasi pemasangan papan penanda Titik Arah Jalur Evakuasi harus strategis, mudah dilihat dari berbagai arah, dan tidak terhalang oleh bangunan atau pohon. Idealnya diletakkan di persimpangan jalan, dekat pos keamanan, atau depan fasilitas umum.



Gambar 3. Pemasangan Penanda Arah Jalur Evakuasi

3. Sosialisasi kepada Warga

Setelah pemasangan, lakukan sosialisasi terkait fungsi titik temu, cara mencapai lokasi, serta tindakan darurat yang harus

dilakukan. Sosialisasi dilakukan melalui perangkat RW dan RT setempat agar dapat menyampaikan informasi pada warga.

4. Pemeliharaan dan Evaluasi Berkala
Papan penanda perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak rusak atau hilang. Jika terjadi perubahan tata ruang atau jalur evakuasi, lokasi dan penandaan titik temu juga perlu dievaluasi ulang.

Penandaan titik temu evakuasi yang dilakukan dengan benar akan membantu meminimalkan kepanikan, meningkatkan ketertiban evakuasi, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa saat terjadi bencana.

2.8 Peran Masyarakat dalam Penandaan Titik Temu

Penandaan titik temu evakuasi merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya mitigasi bencana yang membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah atau pihak penyelenggara kebencanaan, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat secara langsung. Peran masyarakat sangat penting karena masyarakat adalah pihak yang paling terdampak oleh bencana dan sekaligus aktor utama dalam pelaksanaan evakuasi di lingkungan mereka sendiri. Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah memiliki pengetahuan lokal (*local wisdom*) mengenai kondisi geografis, sosial, dan potensi risiko bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penandaan titik temu akan meningkatkan efektivitas penentuan lokasi yang benar-benar strategis, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan warga setempat. Berikut ini

beberapa peran masyarakat yang krusial dalam penandaan titik temu evakuasi:

1. Identifikasi Lokasi yang Strategis

Masyarakat berperan dalam memberikan masukan mengenai lokasi yang paling aman dan mudah dijangkau oleh warga setempat. Karena warga paling memahami kondisi lingkungan sekitar mereka, mereka bisa mengidentifikasi area yang bebas dari risiko seperti banjir, bangunan tua, kabel listrik terbuka, atau reruntuhan saat gempa. Partisipasi ini mencegah penetapan lokasi titik temu yang secara administratif benar, namun secara praktis sulit dijangkau dalam kondisi darurat.

2. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Penentuan titik temu sebaiknya tidak dilakukan sepihak oleh pihak luar atau hanya oleh aparat desa. Masyarakat harus dilibatkan dalam forum musyawarah yang terbuka, seperti rapat RT, RW, atau musyawarah kelurahan. Melalui forum ini, masyarakat bisa menyuarakan pendapat, memberi pertimbangan berdasarkan pengalaman, dan ikut menyepakati lokasi titik temu. Ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberadaan titik temu tersebut.

3. Penyediaan Lokasi Titik Temu

Dalam beberapa kasus, titik temu ditempatkan di lahan milik pribadi atau tempat ibadah seperti masjid, balai RT, atau halaman rumah warga. Dalam hal ini, inisiatif dan kesediaan masyarakat menyediakan ruang atau aset pribadi sebagai titik temu evakuasi menunjukkan kontribusi langsung terhadap kesiapsiagaan lingkungan. Bentuk

partisipasi ini sangat berharga, terutama di daerah padat penduduk yang lahan umumnya terbatas.

4. Partisipasi dalam Proses Pemasangan dan Penandaan
Masyarakat juga dapat dilibatkan secara langsung dalam pemasangan papan penanda titik temu, baik dalam bentuk pengerjaan fisik, pengumpulan bahan, hingga pengecatan. Partisipasi ini memberikan manfaat ganda: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lokasi titik temu serta menghemat biaya pelaksanaan kegiatan. Selain itu, keterlibatan warga secara langsung dapat menjadi sarana edukasi tentang pentingnya titik temu dalam proses evakuasi.

5. Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi
Setelah titik temu ditentukan dan dipasang, peran masyarakat selanjutnya adalah membantu dalam menyebarkan informasi kepada warga lain, khususnya kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Masyarakat dapat melakukannya melalui berbagai cara, seperti menyebar pamflet, membuat grup WhatsApp lingkungan, menyampaikan saat pengajian, arisan RT, atau saat ronda malam. Edukasi yang dilakukan oleh sesama warga akan lebih mudah diterima karena adanya kedekatan sosial dan kultural.

6. Pemeliharaan dan Pengawasan
Keberadaan titik temu evakuasi memerlukan pemeliharaan jangka panjang agar tetap fungsional, tidak rusak, dan tidak disalahgunakan. Masyarakat dapat membentuk kelompok kecil atau menunjuk petugas lingkungan untuk mengawasi kondisi papan penanda, membersihkannya secara berkala,

serta melaporkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Tanpa pengawasan ini, titik temu berisiko diabaikan dan kehilangan fungsinya di masa mendatang.

7. Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan

Peran masyarakat juga penting dalam mengikuti atau menyelenggarakan simulasi evakuasi berbasis titik temu. Kegiatan simulasi ini dapat melatih warga untuk bertindak cepat dan sesuai prosedur saat bencana benar-benar terjadi. Dalam kegiatan ini, titik temu digunakan sebagai lokasi utama berkumpul sehingga masyarakat terbiasa dengan jalur evakuasi dan prosedur tanggap darurat yang benar.

Dalam hal ini, masyarakat bukan sekadar objek yang dilindungi dalam kebijakan kebencanaan, tetapi juga menjadi subjek utama yang berperan aktif dalam proses mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Dalam konteks penandaan titik temu evakuasi, masyarakat berperan mulai dari proses perencanaan, pemilihan lokasi, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pemeliharaan titik temu tersebut. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat keberlanjutan dari fasilitas titik temu, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, yang pada akhirnya akan menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi krisis.

3. KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Upaya mitigasi risiko bencana sangat penting dilakukan, terlebih di wilayah permukiman padat seperti RW 09 Kelurahan Klampis Ngasem yang memiliki potensi risiko bencana seperti kebakaran dan banjir. Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara evakuasi jika terjadi bencana. Tidak adanya titik temu evakuasi yang jelas juga menjadi salah satu kelemahan dalam sistem kesiapsiagaan masyarakat. Melalui program penandaan titik temu evakuasi yang dilakukan mahasiswa KKN, muncul satu bentuk kontribusi nyata yang sederhana tetapi sangat penting untuk membantu masyarakat mengenali titik aman saat terjadi keadaan darurat.

Penempatan titik temu evakuasi ini bukan sekadar bentuk simbolik, melainkan juga memiliki peran penting dalam mendukung proses evakuasi yang lebih cepat dan terkoordinasi. Keberadaan papan penunjuk yang mudah dilihat dan dipahami menjadi awal dari pembentukan budaya sadar bencana. Masyarakat mulai memahami bahwa evakuasi bukanlah hal yang bisa dilakukan secara spontan, tetapi membutuhkan perencanaan dan koordinasi sejak dini. Pendekatan yang dilakukan secara partisipatif, melibatkan warga dalam penentuan lokasi dan proses pemasangan, memberikan dampak positif dalam membangun rasa memiliki serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kesiapsiagaan.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai jembatan

pengetahuan yang menghubungkan teori kebencanaan dengan praktik di lapangan. Dari proses awal hingga akhir, kolaborasi antara mahasiswa, perangkat kelurahan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Program ini diharapkan tidak berhenti pada satu kegiatan, melainkan menjadi cikal bakal terbentuknya sistem kesiapsiagaan yang lebih terstruktur, sehingga jika terjadi bencana, warga tidak panik dan mampu mengambil langkah yang tepat demi keselamatan bersama.

3.2 Saran

Setelah titik temu evakuasi dipasang, perlu adanya tindak lanjut agar fungsinya tidak berhenti sebatas papan penanda. Pemerintah kelurahan bersama warga dapat membentuk kelompok kecil yang fokus pada kesiapsiagaan bencana, misalnya tim siaga lingkungan. Tim ini bisa melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi papan penunjuk, sekaligus merancang simulasi evakuasi yang sederhana namun efektif. Tidak perlu rumit, latihan evakuasi yang dilakukan dua kali setahun sudah cukup untuk membiasakan masyarakat agar tahu harus berbuat apa ketika bencana benar-benar terjadi.

Selain itu, edukasi tentang mitigasi bencana sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan dengan pendekatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Materi kebencanaan bisa disampaikan melalui kegiatan warga seperti arisan, posyandu, pengajian, atau pertemuan RT. Media seperti poster, selebaran, bahkan cerita dari mulut ke mulut juga masih sangat relevan digunakan. Jika memungkinkan, kerja sama dengan mahasiswa atau perguruan tinggi bisa terus dilanjutkan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan teknis, tetapi juga pembaruan informasi dan semangat baru dalam membangun lingkungan yang lebih tanggap dan siap menghadapi bencana.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Tubagus Wasi'ul. 2019. "PUSAT EDUKASI PENGURANGAN DAMPAK BENCANA Bangunan Multiguna Sebagai Tempat Evakuasi, Edukasi, Dan Rekreasi."
- Andrew, Maskrey. 2018. "Revisiting Community-Based Disaster Risk Management." Pp. 42–52 in *Reducing disaster risks*. Routledge.
- Kelman, Ilan. 2015. "Climate Change and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction." *International Journal of Disaster Risk Science* 6(2):117–27.
- Napsiyah, Siti, Ratu Fazrha Bunga Arcadia, Daffa Fadillah Syafa'at, Firdha Putri Puspita, Muhammad Naufal Ardiansyah, and Riani Rifa Amalia. 2023. "Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Dalam Mengembangkan Potensi Pemuda Di Kampung Krajan Desa Simpang." *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 4(2):182–96. doi: 10.52423/jkps.v4i2.18.
- Nuryuningsih, Nuryuningsih, Mayyadah Syuaib, and Rahmadi Rahim. 2021. "Efektivitas Ruang Terbuka Publik Sebagai Titik Kumpul Bencana Di Kelurahan Maccini Sombala, Sulawesi Selatan." *TEKNOSAINS: Media Informasi Sains Dan Teknologi* 15(1):109–17.
- Sari, Wedha, and Nanang Ruhyat. 2024. "Sosialisasi K3: Pentingnya Pemahaman Titik Temu Yang Aman Saat

Bencana.” *Journal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1(2):18–28.

Anggarasari, N. H., & Dewi, R. S. (2019). Mitigasi Bencana Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, 3(1), 1–9.

Kurniawati, D. (2020). Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.3494>

